

Evaluasi Implementasi Peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam Penurunan Stunting di Nagari Kandang Baru Kabupaten Sijunjung

Yoana Alexandra¹, Rahmadani Yusran²

Universitas Negeri Padang, Jl. Prof. Dr. Hamka, Kota Padang

Corresponding Author: yusranrdy@fis.unp.ac.id

Keyword:
Evaluation;
Implementation;
Role of TPK;
Stunting.

Abstract: This study aims to evaluate the implementation of the role of the Family Assistance Team (TPK) in reducing stunting in Nagari Kandang Baru, with a focus on the role of the Family Assistance Team (TPK) in reducing stunting. This study uses a qualitative method with a descriptive approach and the research location is in Nagari Kandang Baru, Sijunjung Regency. This data was collected through observation, interviews, and documentation. Data analysis was carried out by data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study revealed that the role of the Family Assistance Team (TPK) in reducing stunting in Nagari Kandang Baru, Sijunjung Regency was carried out through several efforts, namely conducting counseling/Information and Education Communication (KIE), referral service facilities and social assistance program reception facilities, recording and reporting the results of mentoring and monitoring families at risk of stunting. However, the implementation of the role of the TPK in reducing stunting has not been optimally implemented because there are several problems in its implementation. The problems, for example, in conducting counseling/Information and Education Communication are not optimal, TPK has difficulty in providing assistance to children affected by stunting because they have not been able to convince their families, and there is still a lack of budget provided for TPK. This study concludes that the implementation of the role of TPK in reducing stunting in Nagari Kandang Baru has not been optimally implemented.

Kata Kunci:
Evaluasi;
Implementasi;
Peran TPK;
Stunting

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam penurunan stunting di Nagari Kandang Baru, dengan fokus pada peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam penurunan stunting. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan lokasi penelitian di Nagari Kandang Baru, Kabupaten Sijunjung. Data ini dikumpulkan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam penurunan stunting di Nagari Kandang Baru Kabupaten Sijunjung dilakukan beberapa upaya yaitu melakukan penyuluhan/Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), fasilitas pelayanan rujukan dan fasilitas penerimaan program bantuan sosial, melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pendampingan dan pemantauan keluarga berisiko stunting. Namun demikian, implementasi peran TPK dalam penurunan stunting belum terlaksana dengan optimal karena terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya. Permasalahan tersebut misalnya, dalam melakukan penyuluhan/Komunikasi Informasi dan Edukasi belum optimal, TPK kesulitan dalam melakukan pendampingan kepada anak yang terkena stunting karena belum mampu meyakinkan keluarga, dan masih kurangnya anggaran yang diberikan untuk TPK. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi peran TPK dalam penurunan stunting di Nagari Kandang Baru masih belum optimal di lakukan.

PENDAHULUAN

Menurut World Health Organization (2015) Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan

panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Faktor-faktor yang mempengaruhi stunting adalah kurangnya asupan gizi (gizi buruk), pola asuh yang salah, kemiskinan, dan permasalahan lingkungan ditempat tinggal. Oleh karena itu, penyebab-penyebab stunting ini harus diperhatikan agar angka stunting tidak meningkat dan kesehatan anak dapat terjaga. (dr. Desi Fajar Susanti, 2022)

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting menjelaskan bahwa dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting disusun melalui pendekatan keluarga berisiko stunting. Tujuan dibuat Peraturan Presiden RI Nomor 72 tahun 2021 adalah untuk mengatur strategi nasional percepatan penurunan stunting, penyelenggaraan, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pendanaan (Perpres RI No 72 Tahun 2021). Pemerintah telah menetapkan target strategis berupa pengurangan angka prevalensi stunting hingga mencapai 14% pada tahun 2024. Pencapaian target ini kemudian akan menjadi landasan untuk melanjutkan program pengurangan stunting dalam kerangka tujuan pembangunan berkelanjutan yang akan direalisasikan pada tahun 2030. Namun demikian, implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 72 tahun 2021 belum berhasil mengurangi stunting. Karena masih ada di beberapa daerah di Indonesia yang masih kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Misalnya TPK tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang stunting. Sehingga pada saat berhadapan dengan orang tua yang memiliki anak stunting, para kader kesulitan menjelaskan mengenai stunting dan dampaknya bagi anak di masa depan. Selain itu, para kader juga tidak memiliki buku panduan dalam menjalani peran sebagai TPK bagi keluarga yang teridentifikasi memiliki anak stunting. (Ridha, 2023)

Demikian di Sumatera Barat dalam rangka penurunan percepatan stunting, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 440-380-2020 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting. Tujuan dibuatnya Surat Keputusan tersebut untuk mengurangi stunting di Provinsi Sumatera Barat melalui kegiatan percepatan pencegahan dan penanganan stunting yang lebih efektif dan efisien. Namun demikian, pelaksanaan dalam penurunan stunting di beberapa daerah Provinsi Sumatera Barat masih belum berhasil menurunkan stunting. (SK Gubernur Sumatera Barat No 440-380-2020). Namun demikian, implementasi pelaksanaan dalam penurunan stunting di beberapa daerah Provinsi Sumatera Barat masih belum berhasil menurunkan stunting. Hal ini dapat dilihat dari keterbatasan tersedia anggaran dan sarana prasarana, akses transportasi yang masih kurang memadai akibat jarak yang cukup jauh, masih kurang pemahaman masyarakat akibat kurangnya pemberian penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencegahan stunting (Erick Maulana Putra Nide, 2023). Selanjutnya dapat dilihat dari Kabupaten Pesisir Selatan bahwa upaya untuk mencegah stunting di wilayah Inderapura Barat masih belum optimal dan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain kegiatan Posyandu yang tidak dilaksanakan secara berkala, terbatasnya distribusi Pemberian Makanan Tambahan (PMT), serta Rumah Desa Sehat (RDS) yang tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya (Sentia Indah, 2022). Hal yang sama juga dijelaskan oleh (Dinda Nathalia Juita dkk, 2022) bahwa program pencegahan stunting melalui Rumah Desa Sehat (RDS) di Nagari Tanjung Bonai belum dapat berjalan secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan dana, yang berdampak pada tidak maksimalnya pelaksanaan beberapa fungsi penting. Khususnya, fungsi RDS sebagai pusat literasi kesehatan serta pembentukan dan pengembangan Kader Pembangunan Manusia (KPM) belum dapat direalisasikan sebagaimana mestinya. Sedangkan Implementasi program konvergensi dalam mencegah stunting di Kota Padang belum berjalan sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Pada aspek perencanaan, belum ada regulasi khusus yang ditetapkan Pemerintah Kota Padang terkait penanganan stunting. Sementara dalam pelaksanaannya, program yang dijalankan masih terbatas pada intervensi gizi spesifik, sedangkan program intervensi gizi sensitif belum terintegrasi dan masih dilakukan secara terpisah (Muhammad Iqbal, 2021). Hal yang berbeda juga dijelaskan oleh (Aprillia Kinanti, 2022) bahwa program pencegahan dan penanggulangan stunting di Nagari Kajai belum mencapai hasil yang diharapkan, yang tercermin dari tiga aspek

utama: (1) pelaksanaan program yang belum optimal sehingga gagal meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat, (2) minimnya peningkatan pemahaman masyarakat tentang bahaya stunting meskipun telah diadakan berbagai kegiatan edukasi, dan (3) tidak adanya perubahan signifikan dalam pola pemberian gizi karena orang tua yang telah mendapat edukasi lebih memprioritaskan pekerjaan, sehingga pengasuhan anak diserahkan kepada pihak yang tidak memiliki pengetahuan memadai tentang pencegahan stunting.

Di Kabupaten Sijunjung penurunan stunting didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Sijunjung No 188.45/23/KPTS-BPT-2023 tentang Pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK). Dalam SK Bupati Sijunjung tersebut menjelaskan bahwa tugas TPK adalah: 1) Melakukan penyuluhan/Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), fasilitas pelayanan rujukan dan fasilitas penerimaan program bantuan sosial. 2) Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pendampingan dan pemantauan keluarga berisiko stunting. Kemudian juga dimuat tentang biaya operasional untuk mendukung biaya operasional TPK. Dalam Surat Keputusan Bupati Sijunjung No 188.45/23/KPTS-BPT-2023 tentang Pembentukan TPK menjelaskan bahwa biaya operasional terdiri dari: 1) Belanja cetak sebesar Rp 30.000,00/orang/TPK. 2) Paket pulsa sebesar Rp 70.000,00/orang/TPK. 3) Transportasi sebesar Rp 100.000,00/orang/TPK. (SK Bupati Sijunjung No 188.45/23/KPTS-BPT-2023)

Namun demikian, tujuan dari Surat Keputusan Bupati tersebut belum berhasil dicapai oleh TPK. Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan berikut: 1) Upaya penurunan stunting dalam melakukan penyuluhan/komunikasi informasi dan edukasi (KIE) belum berhasil karena TPK belum mampu dalam meningkatkan jumlah dukungan karena kurangnya partisipasi masyarakat dari setiap kegiatan yang dilaksanakan. 2) Upaya TPK dalam penurunan stunting dalam bentuk edukasi belum mampu untuk meyakinkan keluarga yang anaknya menderita stunting. Karena masih ada masyarakat yang tidak menerima anaknya stunting. 3) TPK mengalami kesulitan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena stunting. Hal ini dapat dilihat dari bantuan untuk keluarga stunting yang mampu dan tidak mampu, serta masih ada masyarakat tidak mau menerima bantuan karena masyarakat tersebut tidak mengakui kalau anaknya stunting. 4) TPK kesulitan dalam melakukan pendampingan kepada anak yang terkena stunting dan calon pengantin (catin) karena belum mampu meyakinkan keluarga dan kurang maksimalnya pendampingan terhadap catin yang dilakukan 1 bulan sebelum pranikah. 5) Kurangnya anggaran dari pemerintah terkait penurunan stunting.

Tujuan penulisan yang ingin dicapai adalah untuk menganalisis evaluasi implementasi peran TPK dalam penurunan stunting di Nagari Kandang Baru Kabupaten Sijunjung. Penelitian evaluatif seperti ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang sejauh mana peran TPK telah berkontribusi dalam upaya penurunan stunting di Nagari Kandang Baru. Penelitian ini dapat mengidentifikasi praktik-praktik terbaik, tantangan, dan area perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program penurunan stunting melalui peran TPK. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan berharga bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi dan memperkuat program-program terkait.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan dilakukan penulis merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus penelitian ini yaitu evaluasi implementasi peran TPK dalam penurunan stunting. Penelitian ini dilakukan disalah satu Nagari yang ada di Kabupaten Sijunjung yaitu Nagari Kandang Baru. Informan dalam penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB), Kader KB, Kader PKK, Bidan, dan Orang Tua anak Stunting. Teknik pengumpulan data dalam penelitian dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori implementasi kebijakan oleh Edwards III, dimana terdapat empat model implementasi kebijakan ini meliputi: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selanjutnya untuk mengevaluasi peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan oleh William N

Dunn, dimana terdapat enam indikator evaluasi terhadap kebijakan yakni: efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan kelayakan.

HASIL DAN DISKUSI

Pada bagian ini, peneliti akan menjelaskan hasil penelitian tentang implementasi peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam penurunan stunting di Nagari Kandang Baru Kabupaten Sijunjung. Adapun temuan dalam penelitian ini berpedoman pada SK Bupati Sijunjung No 188.45/23/KPTS-BPT-2023 yakni:

1. Melakukan Penyuluhan/Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)

Upaya dalam penurunan stunting di Nagari Kandang Baru yang pertama yaitu melakukan penyuluhan/Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE). TPK melaksanakan kegiatan penyuluhan di Nagari Kandang Baru sebagai upaya menurunkan angka stunting. TPK memberikan penyuluhan dan edukasi kepada keluarga tentang pentingnya pola asuh yang tepat, pemberian nutrisi seimbang, dan perilaku hidup bersih dan sehat sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun (baduta). Tujuan penyuluhan ini adalah sebagai upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya asupan gizi serta upaya pencegahan stunting pada masyarakat. Namun, penyuluhan/Komunikasi Informasi dan Edukasi belum dilaksanakan dengan rutin. Bahkan penyuluhan yang diberikan TPK belum diikuti oleh semua masyarakat dan belum dimengerti oleh beberapa masyarakat. Selain itu masih ada masyarakat yang tidak mendengarkan ketika diberikan penyuluhan sehingga mereka tidak memahami isi penyuluhan tersebut. Hal ini dapat dilihat ketika peneliti melakukan wawancara dengan salah satu orang tua anak. Ketika peneliti bertanya tentang isi penyuluhan yang diberikan beliau tidak mengetahui bahkan tempat dilakukan penyuluhan yang beliau katakan berbeda dengan jawaban masyarakat lain bahkan kader lain.

2. Fasilitas Pelayanan Rujukan

Upaya dalam penurunan stunting di Nagari Kandang Baru yang kedua yaitu memfasilitasi layanan rujukan. TPK di Nagari Kandang Baru telah secara aktif memfasilitasi layanan rujukan bagi masyarakat yang membutuhkan. Melalui pendampingan yang intensif, TPK membantu mengidentifikasi keluarga yang memerlukan rujukan kesehatan khusus, memberikan informasi tentang rujukan yang tepat, dan memastikan akses ke fasilitas kesehatan yang sesuai. TPK juga berkoordinasi dengan puskesmas dan fasilitas kesehatan seperti BPJS untuk memperlancar proses rujukan, serta melakukan pemantauan terhadap keluarga yang mendapat layanan rujukan. Fasilitas layanan kesehatan ini sangat penting diberikan untuk masyarakat agar proses pengobatan untuk anak yang sakit dapat berjalan dengan baik.

3. Fasilitas Penerimaan Program Bantuan Sosial

Upaya dalam penurunan stunting di Nagari Kandang Baru yang ketiga yaitu memfasilitasi penerimaan program bantuan sosial. TPK di Nagari Kandang Baru telah berperan aktif dalam memfasilitasi penerimaan program bantuan sosial bagi masyarakat. TPK membantu mengidentifikasi keluarga yang memenuhi kriteria penerima bantuan, memastikan kelengkapan dokumen persyaratan, dan memberikan informasi yang jelas tentang mekanisme penerimaan bantuan. TPK juga melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk memperlancar proses penyaluran bantuan sosial, serta memantau ketepatan sasaran penerimaan bantuan. Upaya fasilitasi ini bertujuan memastikan program bantuan sosial dapat diterima oleh keluarga yang membutuhkan di Nagari Kandang Baru secara tepat sasaran. Namun, dalam penyaluran bantuan ke Masyarakat, masih ada masyarakat stunting yang tidak menerima bantuan tersebut karena masyarakat tersebut tidak menerima bahwa anaknya stunting. Selain itu, ada juga masyarakat yang awalnya tidak menerima anaknya stunting setelah adanya bantuan masyarakat tersebut baru menerima kalau anaknya stunting.

4. Melakukan Pendampingan dan Pencatatan Laporan Hasil Pendampingan

Upaya dalam penurunan stunting di Nagari Kandang Baru yaitu memberikan pendampingan dan pelaporan hasil pendampingan dan pemantauan keluarga beresiko stunting. Sasaran pendampingan ini adalah ibu hamil, catin, pasca salin, dan baduta. TPK telah melaksanakan pendampingan secara komprehensif kepada masyarakat di Nagari Kandang Baru. Melalui pendekatan yang intensif, TPK memberikan dukungan dalam aspek kesehatan.

Pendampingan dilakukan dengan kunjungan rutin ke rumah-rumah warga. Pendampingannya yaitu memantau bagaimana keadaan catin, ibu hamil, baduta, dan pasca salin. Selain itu TPK juga memberikan motivasi untuk perubahan perilaku yang lebih baik. Setelah itu, TPK membuat laporan dengan elektronik yang dinamakan elsimil dan laporan dengan manual yang disebut visum. Namun, masih ada hambatan yang dialami TPK dalam melakukan pendampingan kepada anak yang terkena stunting karena belum bisa meyakinkan keluarga. Masih ada masyarakat yang tidak mau menerima bahwa anaknya mengalami stunting. Penolakan ini muncul dalam berbagai bentuk, seperti ketidakpercayaan terhadap diagnosis stunting, rasa malu mengakui kondisi anak, hingga keengganan untuk mengikuti program pendampingan. Hal ini disebabkan karena rendahnya SDM. Sehingga masyarakat tidak mengerti tentang pendampingan yang diberikan. Selain itu penyebabnya adalah ekonomi dan pendidikan yang masih rendah juga.

Kemudian dalam menjalankan peran TPK dalam penurunan stunting, masih ada TPK yang merasakan bahwa kurangnya anggaran yang diberikan. Namun dengan keterbatasan anggaran ini, TPK juga tidak mempersulit dan TPK tetap melaksanakan tugasnya, bahkan untuk mengatasinya TPK ada menggunakan dana pribadi untuk membantu masyarakat. Dana operasional yang diberikan yaitu pertama uang saku sebesar Rp 100.000,00, pulsa Rp 70.000,00, dan biaya cetak Rp 30.000,00.

Dari penjelasan di atas dijelaskan kembali bahwa implementasi program TPK menghadapi tantangan utama pada aspek sosial-budaya masyarakat, terutama terkait penerimaan status stunting dan pemahaman program. Meski beberapa aspek teknis seperti sistem rujukan dan pelaporan sudah berjalan baik, perlu penguatan pada aspek edukasi dan pendekatan sosial-budaya untuk meningkatkan efektivitas program.

Dilihat dari pendapat Edwards III tentang implementasi kebijakan yang mengatakan bahwa ada empat variabel mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Maka selanjutnya dijelaskan Implementasi peran TPK dalam penurunan stunting di Nagari Kandang Baru Kabupaten Sijunjung sebagai berikut:

1. Implementasi Menurut Edwards III

a. Komunikasi

Dalam teori implementasi kebijakan yang dikemukakan Edward III, komunikasi ditempatkan sebagai faktor krusial dan fundamental untuk mencapai efektivitas pelaksanaan kebijakan publik. Edward III menekankan bahwa komunikasi dalam konteks ini merujuk pada proses penyampaian dan penyebarluasan informasi kebijakan, baik kepada institusi-institusi publik maupun yang terpenting kepada masyarakat selaku penerima manfaat dan pemangku kepentingan utama dari kebijakan tersebut. Implementasi peran Tim Pendamping Keluarga dalam program penurunan stunting, ditinjau dari aspek komunikasi masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini terlihat dari beberapa kendala dalam proses penyampaian informasi dan koordinasi yang dilakukan. Implementasi peran Tim Pendamping Keluarga dalam program penurunan stunting di Nagari Kandang Baru, ditinjau dari aspek komunikasi masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini terlihat dari beberapa kendala dalam proses penyampaian informasi dan koordinasi yang dilakukan. Transmisi informasi dari Tim Pendamping Keluarga kepada masyarakat masih mengalami hambatan, dimana penyampaian materi penyuluhan belum sepenuhnya dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Kejelasan informasi yang disampaikan juga masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal penggunaan bahasa dan metode penyuluhan yang lebih mudah diterima oleh masyarakat. Selain itu, konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan di posyandu belum berjalan secara rutin, yang mengakibatkan terganggunya alur informasi kepada masyarakat. Hal ini juga mengakibatkan tidak optimalnya dalam melakukan pendampingan, karena masyarakat tidak memahami materi penyuluhan sehingga masyarakat tersebut tidak menerima anaknya stunting. Meskipun Tim Pendamping Keluarga telah berupaya menjalankan tugasnya, namun diperlukan perbaikan dalam aspek komunikasi agar implementasi program penurunan stunting dapat berjalan lebih efektif di Nagari Kandang Baru.

b. Sumber Daya

Salah satu syarat agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik adalah kepemilikan terhadap sumber daya. Implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif jika para pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakannya. Edward III menekankan pentingnya sumber daya dalam implementasi kebijakan dengan menyatakan bahwa "kekurangan sumber daya akan menyebabkan ketidakefektifan dalam pelaksanaan kebijakan". Implementasi peran Tim Pendamping Keluarga di Nagari Kandang Baru dalam aspek sumber daya manusia menunjukkan kondisi yang baik. Hal ini terlihat dari jumlah ketersediaan sumber daya manusia yang baik, dimana jumlah tim pendamping telah memadai untuk melaksanakan perannya ke masyarakat stunting. Namun, meskipun aspek sumber daya manusia telah berjalan dengan baik, masih ditemui tantangan dalam hal pemahaman masyarakat terhadap materi penyuluhan yang disampaikan. Sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memahami informasi-informasi penting terkait pencegahan stunting. Hal ini mengindikasikan perlunya penyesuaian metode penyampaian materi agar lebih mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, meskipun dari segi sumber daya tim pendamping sudah memadai. Selain itu, terdapat keterbatasan pada sumber daya finansial dimana anggaran operasional belum mencukupi. Sehingga kondisi ini bahkan mendorong TPK menggunakan dana pribadi untuk membantu pemeriksaan USG ibu hamil di Nagari Kandang Baru.

c. Disposisi

Menurut teori Edward III, agar para pelaksana dapat menjalankan sebuah kebijakan dengan efektif, mereka harus mampu melaksanakan apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Namun, jika terdapat perbedaan pandangan atau sikap antara pelaksana dan pembuat kebijakan, proses implementasi akan menjadi lebih rumit. Disposisi ini berkaitan dengan kesiapan dan komitmen pelaksana, konsistensi dalam tindakan, serta kejujuran mereka dalam menjalankan kebijakan secara benar dan sesuai tujuan. Selain itu, tingkat demokrasi dalam proses pelaksanaan kebijakan juga turut memengaruhi keberhasilannya. Disposisi atau sikap dari TPK dalam melaksanakan perannya untuk penurunan stunting di Nagari Kandang Baru menunjukkan komitmen dan dedikasi yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari konsistensi dan kesungguhan TPK dalam memberikan pendampingan kepada keluarga sasaran meski menghadapi berbagai tantangan, sikap proaktif dalam melakukan kunjungan rutin ke rumah-rumah warga untuk memantau perkembangan anak dan kondisi ibu hamil, kesediaan TPK untuk memberikan waktu dan tenaga ekstra di luar jam kerja ketika dibutuhkan oleh masyarakat, inisiatif tinggi dalam mencari solusi kreatif atas berbagai permasalahan yang dihadapi keluarga dampingan, dan kesediaan untuk menggunakan sumber daya pribadi demi kelancaran program ketika terkendala anggaran. Namun, dalam implementasi tugas penyuluhan TPK masih belum konsisten karena TPK masih belum melaksanakannya dengan rutin.

d. Struktur Birokrasi

Dalam model implementasi kebijakan publik, Edward III mengidentifikasi struktur birokrasi sebagai komponen keempat yang memiliki peran vital. Dalam penjabarannya, struktur birokrasi terdiri dari dua elemen utama. Pertama, adanya SOP (Standard Operating Procedure) yang berfungsi sebagai pedoman atau protokol baku dalam pelaksanaan kebijakan, dan kedua, pengorganisasian yang meliputi pembagian tugas dan tanggung jawab dalam organisasi. Kedua aspek ini saling melengkapi untuk memastikan kelancaran proses implementasi kebijakan. Jika dilihat dari aspek SOP, TPK di Nagari Kandang Baru memiliki pedoman kerja yang jelas dalam melakukan penyuluhan/KIE kepada keluarga, dimana materi edukasi difokuskan pada pola asuh, nutrisi, dan perilaku hidup sehat dari masa kehamilan hingga anak usia 2 tahun. Kemudian terdapat mekanisme yang sistematis dalam proses fasilitasi rujukan kesehatan, mulai dari identifikasi keluarga yang membutuhkan hingga koordinasi dengan puskesmas dan BPJS. TPK juga ada prosedur baku dalam memfasilitasi bantuan sosial yang mencakup tahapan identifikasi, verifikasi dokumen, dan koordinasi dengan dinas terkait. Dan terakhir dalam sistem pendampingan dan pelaporan dilakukan secara terstruktur melalui kunjungan rutin serta pencatatan baik elektronik (elsimil) maupun manual (visum). Kemudian dilihat dari aspek struktur organisasi atau pembagian kerja, TPK sebelum melaksanakan tugasnya, mereka melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab dalam tim. TPK melaksanakan tugas sesuai

dengan SK tetapi TPK juga mendapatkan tugas tambahan dalam hasil pelaporan yaitu dari kader KB lebih aktif dalam melaksanakan pendampingan kepada masyarakat dan kader KB juga membuat laporan dengan manual. Kader PKK memasukkan laporan ke aplikasi elsimil, sedangkan bidan memberikan pemantauan dan pengobatan untuk anak stunting yang sakit dan. Namun, kader KB dan bidan juga melakukan input data ke aplikasi elsimil.

Jadi berdasarkan analisis pada penjelasan diatas, dapat dijelaskan kembali bahwa implementasi program penurunan stunting di Nagari Kandang Baru menunjukkan variasi keberhasilan pada setiap aspek. Meski struktur birokrasi dan disposisi TPK menunjukkan kinerja yang baik, masih terdapat tantangan signifikan pada aspek komunikasi dan keterbatasan sumber daya finansial. Diperlukan perbaikan terutama dalam metode komunikasi dan penyediaan anggaran yang memadai untuk mengoptimalkan pelaksanaan program.

2. Evaluasi Kebijakan Menurut William N Dunn

a. Efektivitas

Menurut Dunn (2018) untuk mengevaluasi sebuah kebijakan, bisa dilihat dari efektifitas kebijakan tersebut. Dunn (2018) menegaskan bahwa Efektifitas yaitu keinginan pencapaian tujuan secara tepat dengan tujuan-tujuan yang tepat dan arah kebijakan yang dibuat sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Di Kandang Baru Tim Pendamping Keluarga menunjukkan kinerja yang belum efektif dalam menjalankan perannya untuk menurunkan stunting. Hal ini terlihat dari dedikasi mereka dalam melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga, memberikan edukasi gizi dan pola asuh, serta aktif berkoordinasi dengan berbagai stakeholder terkait. Namun, evaluasi terhadap implementasi peran TPK dalam penurunan stunting menunjukkan hasil yang belum optimal. Hal ini terlihat dari program penyuluhan atau Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang belum mencapai target yang diharapkan. Transfer pengetahuan kepada masyarakat masih menghadapi kendala, dimana masih banyak warga yang belum memahami dengan baik konsep stunting, gizi, dan pola asuh yang tepat. Meskipun demikian, terdapat aspek positif dalam hal sistem rujukan kesehatan yang telah berjalan dengan efektif, mampu mengidentifikasi kasus dan menghubungkan masyarakat dengan layanan kesehatan yang sesuai seperti puskesmas, dokter spesialis, dan ahli gizi.

b. Efisiensi

Menurut Dunn (2018) efisiensi yaitu usaha pencapaian hasil yang digunakan secara optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang ada. Di Kandang Baru Tim Pendamping Keluarga menghadapi tantangan serius dalam hal pengelolaan sumber daya, terutama terkait pendanaan. Keterbatasan dana operasional menjadi kendala utama, bahkan sampai mengharuskan petugas TPK menggunakan dana pribadi untuk menjalankan program. Kondisi ini mengindikasikan perlunya evaluasi dan penyesuaian alokasi anggaran agar program dapat berjalan lebih efisien dan berkelanjutan tanpa membebani petugas secara pribadi.

c. Kecukupan

Menurut Dunn (2018) kecukupan yaitu kebijakan dalam pelaksanaan dalam program dan peraturan yang ditetapkan antara kerjasama kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan. Tim Pendamping Keluarga di Nagari Kandang Baru telah menunjukkan variasi pencapaian yang signifikan. Sistem rujukan kesehatan telah menunjukkan tingkat kecukupan yang baik dengan tersedianya mekanisme identifikasi kasus dan rujukan ke fasilitas kesehatan yang sesuai. Program bantuan sosial juga telah disediakan dalam berbagai bentuk, baik sembako maupun bantuan tunai. Namun, masih diperlukan peningkatan dalam hal intensitas dan metode penyuluhan untuk memastikan transfer pengetahuan yang lebih efektif kepada masyarakat.

d. Pemerataan

Menurut Dunn (2018) pemerataan adalah pemberian pencapaian hasil kebijakan terhadap organisasi maupun lingkungan secara menyeluruh berdasarkan dengan tugas dan fungsinya. Menurut Dunn (2018) pemerataan mengacu pada pemberian pencapaian hasil kebijakan secara menyeluruh kepada organisasi dan lingkungannya berdasarkan tugas dan fungsi dengan mempertimbangkan permasalahan yang ada. Di Nagari Kandang Baru aspek pemerataan dalam implementasi peran TPK masih memerlukan perhatian khusus. Ketidakrutinan pelaksanaan

program penyuluhan mengindikasikan adanya masalah dalam distribusi layanan secara merata. Variasi respons masyarakat terhadap bantuan sosial juga menunjukkan perlunya penyesuaian pendekatan agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh kelompok sasaran. Diperlukan strategi yang lebih adaptif dalam pendekatan pendampingan untuk mengatasi resistensi yang muncul di masyarakat. Namun, TPK sudah mendistribusikan layanan yang merata ke seluruh jorong, dimana setiap keluarga sasaran mendapatkan kesempatan yang sama dalam menerima pendampingan dan edukasi tentang pencegahan stunting. Pemerataan ini tercermin dari kunjungan yang dilakukan ke rumah-rumah warga tanpa membedakan lokasi tempat tinggal mereka, baik yang dekat maupun yang jauh. Tim Pendamping Keluarga juga telah berhasil menjangkau berbagai lapisan masyarakat, mulai dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah hingga keluarga dengan ekonomi yang lebih baik. Upaya pemerataan yang baik ini juga ditunjukkan melalui pemberian perhatian khusus kepada keluarga yang memiliki balita berisiko stunting.

e. Responsivitas

Menurut Dunn (2018) Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, serta melaksanakan mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Di Nagari Kandang Baru Tim Pendamping Keluarga telah menunjukkan responsivitas yang baik dalam menjalankan perannya. Hal ini terlihat dari kecepatan dan ketanggapan TPK dalam merespon berbagai situasi terkait stunting di masyarakat. Mereka sigap dalam memberikan pendampingan ketika ada laporan tentang balita yang mengalami masalah gizi atau berisiko stunting. Daya tanggap yang baik ini juga tercermin dari kemampuan TPK dalam mengenali kebutuhan spesifik setiap keluarga dan memberikan solusi yang sesuai. Mereka berkomunikasi dengan tenaga kesehatan setempat untuk penanganan kasus-kasus tertentu dan cepat dalam memberikan informasi serta edukasi yang dibutuhkan masyarakat. Tim Pendamping Keluarga juga menunjukkan kepekaan yang tinggi terhadap kondisi sosial budaya masyarakat, sehingga dapat menyesuaikan pendekatan dalam memberikan pendampingan. Responsivitas yang baik ini telah membantu membangun kepercayaan masyarakat. Namun, dalam melaksanakan program TPK juga menghadapi tantangan dalam hal partisipasi masyarakat yang masih rendah. Fenomena penolakan bantuan sembako karena ketidakmauan mengakui status stunting anak mereka menunjukkan adanya kesenjangan antara desain program dengan preferensi masyarakat. Menariknya, masyarakat menunjukkan responsivitas yang lebih positif terhadap bantuan dalam bentuk uang tunai, mengindikasikan perlunya penyesuaian bentuk intervensi sesuai dengan preferensi masyarakat.

f. Ketepatan

Menurut Dunn (2018) Ketepatan mengacu kepada apakah hasil tujuan yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai. Tim Pendamping Keluarga telah menunjukkan ketepatan yang baik dalam menjalankan perannya di Nagari Kandang Baru. Hal ini terlihat dari kemampuan mereka dalam memberikan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing keluarga. Ketepatan ini tercermin dari pelaksanaan program yang mengikuti pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan. TPK telah tepat dalam mengidentifikasi keluarga sasaran yang membutuhkan pendampingan prioritas, khususnya keluarga dengan balita yang berisiko stunting. Namun, TPK memerlukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan benar-benar memberikan nilai dan manfaat yang diharapkan. Diperlukan perbaikan strategi pemberian bantuan sosial dan penyesuaian pendekatan kepada masyarakat untuk mengatasi resistensi yang ada. Evaluasi ini juga harus mencakup berbagai aspek program secara komprehensif, mulai dari metode penyuluhan hingga alokasi anggaran.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dijelaskan kembali bahwa terdapat kesenjangan antara upaya yang dilakukan dengan hasil yang dicapai, menunjukkan adanya masalah dalam efektivitas implementasi program. Salah satu masalahnya yaitu masalah pendanaan menjadi kendala fundamental yang dapat mengancam keberlanjutan program dan perlu mendapat prioritas penanganan. Selain itu, resistensi masyarakat dan rendahnya partisipasi menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih *culturally sensitive* dan berorientasi pada preferensi

masyarakat. Sehingga program ini memerlukan evaluasi komprehensif dan penyesuaian strategi untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutannya.

Sedangkan rekomendasi yang diberikan yaitu melakukan evaluasi dan restrukturisasi anggaran untuk mengatasi masalah pendanaan, mengembangkan metode penyuluhan yang lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik masyarakat local, menyesuaikan bentuk bantuan dengan preferensi masyarakat untuk meningkatkan penerimaan program, dan meningkatkan kapasitas TPK melalui pelatihan tentang pendekatan *culturally sensitive* dalam pendampingan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari penjelasan diatas, data lapangan yang telah dipaparkan mengenai evaluasi implementasi TPK dalam penurunan stunting di Nagari Kandang Baru yaitu program penyuluhan/KIE belum optimal karena ketidakrutinan pelaksanaan dan partisipasi masyarakat yang rendah, sementara sistem rujukan kesehatan sudah berjalan dengan mengidentifikasi kasus dan merujuk ke fasilitas yang sesuai seperti puskesmas, dokter spesialis, dan ahli gizi. Kemudian masih ditemukan tingkat keberhasilan penyuluhan yang rendah, namun sistem rujukan kesehatan cukup efektif dalam menghubungkan masyarakat dengan layanan yang dibutuhkan. Penerimaan bantuan sosial menunjukkan variasi respons dimana masih ada masyarakat cenderung menolak bantuan sembako karena tidak mengakui status stunting anak mereka, tetapi bersedia menerima bantuan dalam bentuk uang. Hasil penilaian mengindikasikan bahwa transfer pengetahuan belum efektif karena masih ada masyarakat yang tidak memahami stunting, gizi, dan pola asuh, sementara pendampingan mengalami hambatan karena resistensi masyarakat dalam mengakui status stunting anak mereka. Analisis informasi menunjukkan kendala utama meliputi ketidakrutinan program penyuluhan, partisipasi masyarakat yang rendah, penolakan status stunting, perbedaan respons terhadap jenis bantuan, dan hambatan dalam pendampingan. Berdasarkan penilaian dan manfaat, diperlukan peningkatan intensitas dan metode penyuluhan, penguatan sistem rujukan, evaluasi strategi pemberian bantuan sosial, serta penyesuaian pendekatan pendampingan untuk mengatasi resistensi masyarakat. Dan yang terakhir terdapat keterbatasan dana operasional namun TPK tetap menjalankan tugasnya secara profesional bahkan rela menggunakan dana pribadi, sehingga diperlukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh dalam berbagai aspek program penanganan stunting, mulai dari metode penyuluhan, strategi pendekatan kepada masyarakat, hingga alokasi anggaran yang lebih memadai untuk mencapai tujuan penurunan angka stunting secara efektif.

REFERENSI

- Ridha, A. A. (2023). Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Tarakan Melalui Penguatan Kader Tim Pendamping Keluarga. *Jurnal GEMBIRA*, 674-681.
- Dr. H. Tachjan, M. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).
- Dr. Sahya Anggara, M. (2018). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Dr. Uddin B. Sore, S. M. (2017). *Kebijakan Publik*. In S. M. Dr. Uddin B. Sore, *Kebijakan Publik* (pp. 2-34). Makassar: CV SAH MEDIA.
- Erick Maulana Putra Nide, R. Y. (2023). Eksplorasi Faktor Yang Mempengaruhi Program Gerakan Mentawai Anti Stunting Gizi Buruk Peduli Anak (Masgiburdua) Di Kabupaten Kepulauan Mentawai. *JISIP*, 1239-1244.
- Indah, S., & Yusran, R. (2022). Upaya Pencegahan Stunting Di Nagari Inderapura Barat Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 16511-16516.

- Iqbal, M., & Yusran, R. (2021). Upaya Konvergensi Kebijakan Pencegahan Stunting Di Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 109-116.
- Juita, D. N., Yusran, R., Eriyenti, F., & Alhadi, Z. (2022). Efektivitas Pencegahan Stunting Melalui Rumah Desa Sehat (RDS) di Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 16734-16744.
- Kinanti, A., & Yusran, R. (2022). Implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan stunting berbasis nagari di Nagari Kajai Pasaman Barat. *Journal of Civic Education*, 5(3), 293-300.
- Kumaladewi, R., & Yusran, R. (2023). Dinamika Advokasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Kota Padang. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(2), 1119-1124.
- Leo Agustino, P. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Pulik*. Bandung: CV. Alfabeta
- Lexy J, Moleng (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya
- Nugroho, D. R. 2009. *Public Policy*, Edisi Kedua. Jakarta. PT. ElexMedia Komputindo
- Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 Percepatan Penurunan Stunting (<https://peraturan.bpk.go.id/Details/174964/perpres-no-72>)
- Febrian, F., & Yusran, R. (2021). Koordinasi dalam implementasi kebijakan pencegahan stunting di Kota padang. *jurnal manajemen dan ilmu administrasi publik*, 3(1), 11-21.
- Sari, D. P., & Yusran, R. (2022). Evaluasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Nagari Pulakek Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan. *Journal of Civic Education*, 5(1), 90-100.
- Surat Keputusan Bupati Sijunjung 188.45/23/KPTS-BPT-2023
- Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No 440-380-2020 <http://repo.unand.ac.id/39558/>
- Susanti, D. F. (2022). Mengenal Apa Itu Stunting (Kemenkes). *Kementerian Kesehatan RI*, 1-6. Retrieved from https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1388/mengenal-apa-itu-stunting
- Uliyatul Laili, E. B. (2022). Peran Pendamping Keluarga Dalam Menurunkan Stunting. *Media Gizi Indonesia*, 120-126.